

BAB V

KESIMPULAN

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut berada dikawasan terluar yang memerlukan penjagaan dan pengawasan yang sangat serius. Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan seakan kembali terulang dengan memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia dalam memperebutkan kawasan Ambalat. Pelanggaran batas atau klaim kepemilikan oleh Malaysia terhadap wilayah Ambalat merupakan ancaman terhadap keutuhan kedaulatan dan wibawa bangsa Indonesia dimata dunia internasional.

Pada kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan, ada beberapa point yang menyebabkan kekalahan Indonesia dalam Mahkamah Internasional, diantaranya adalah *preservation* (pemeliharaan), yang mana seharusnya Militer Indonesia dapat melakukan pemeliharaan dan *effective occupied* dikawasan Sipadan-Ligitan tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat terlaksana karena keterbatasan alat, seperti kapal perang ataupun kapal patroli yang dimiliki oleh Militer Indonesia untuk menjaga kawasan-kawasan terluar tersebut, serta minimnya anggaran untuk melakukan operasi atau patroli diwilayah tersebut secara rutin.

Dampak dari minim dan usangnya Alutsista yang dimiliki oleh Militer Indonesia tersebut mengakibatkan TNI tidak mampu menjaga seluruh cakupan wilayah kedaulatan Indonesia, serta tidak dapat menunjukkan eksistensi pada wilayah yang menjadi kedaulatannya terutama pada kawasan pulau terluar.

Pengawasan atau patroli secara terus menerus dikawasan yang berada di bagian terluar atau berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sejatinya akan dapat mencegah terjadi pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia, sebagaimana yang terjadi pada kasus lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan ke tangan Malaysia. Kurangnya pengawasan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran atau klaim wilayah oleh Malaysia. Militer sebagai otoritas atau pihak yang diberi tugas atau kewenangan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia, seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan atau bahkan pemberdayaan terhadap wilayah yang berada dikawasan terluar tersebut. Dengan adanya pengawasan serta pemberdayaan secara terus menerus terhadap wilayah atau pulau yang belum berpenghuni misalnya, maka ini merupakan salah satu point untuk memperkuat diplomasi Indonesia jika terjadi sengketa dengan negara tetangga, jika seandainya masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional.

Selain karena lemahnya kemampuan Militer Indonesia dalam melakukan tugas-tugas pokoknya, kemampuan daya gentar atau daya tangkal yang dimiliki oleh Militer Indonesia sendiri belum mampu untuk menakuti pihak Malaysia. Lemahnya daya gertak terhadap pihak Malaysia disebabkan tidak maksimal nya kemampuan Alutsista yang dimiliki oleh Militer Indonesia. Peralatan yang usang dan sudah tua tersebut tidak mampu meng-*counter* segala bentuk ancaman dari pihak asing. Minimnya anggaran untuk pertahanan serta embargo militer yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Militer Indonesia mengakibatkan lamban serta terhambatnya TNI dalam memodernisasi Alutsistanya, sehingga

penguasaan terhadap teknologi militer yang terbaru pun para prajurit TNI ketinggalan dengan militer Malaysia.

Dalam konfrontasi dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia seolah memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam menghadapi militer Indonesia, hal tersebut disebabkan disamping karena lemahnya daya gentar yang dimiliki oleh Militer Indonesia, Malaysia juga memiliki aliansi pertahanan lima negara *Five Power Defense Agreement*. Dalam kerjasama pertahanan tersebut dinyatakan bahwa, serangan terhadap salah satu negara aliansi merupakan serangan terhadap negara aliansi lainnya. Faktor lemahnya Militer Indonesia dan adanya aliansi pertahanan dengan lima negara, semakin menguatkan persepsi Malaysia, bahwa militer Indonesia bukanlah suatu ancaman yang menakutkan bagi mereka, apalagi setelah Militer Indonesia mendapatkan embargo dari Amerika Serikat, sehingga TNI kesulitan untuk memperoleh suku cadang dari Alutsistanya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan seolah-olah Militer Indonesia tidak mempunyai taring terhadap Malaysia, sehingga perundingan-perundingan yang dilakukan dengan Malaysia pun tidak efektif, hal itu terbukti dengan tidak adanya keputusan yang pasti mengenai perundingan kawasan Ambalat hingga saat ini.

Penelitian ini sendiri sangat berhubungan erat dengan studi tentang Diplomasi, yang mana penyelesaian sengketa Ambalat menuntut adanya suatu penyelesaian dengan melakukan perundingan delegasi antar negara. Hal ini juga berhubungan dengan Ilmu Hukum Internasional, dimana para diplomat atau juru runding Indonesia harus paham betul dengan peraturan-peraturan yang berlaku di

dunia Internasional, sehingga para diplomat Indonesia mampu mengenal medan yang akan ditempuh, dengan demikian diplomasi diharapkan mampu berjalan secara benar dan efektif.

Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono harus mengambil pilihan yang tepat dalam sistem pertahanan Nasional Indonesia, karena dihadapkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis, dimana Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bila kita semua bijak terhadap rasa nasionalisme kita sendiri, maka sebenarnya secara langsung ataupun tidak, kondisi tersebut telah mengamanatkan bahwa kekuatan Tentara Nasional Indonesia harus selalu ditingkatkan. Militer Indonesia seharusnya mampu menjalankan fungsinya sebagai faktor penekan dalam bernegosiasi atau berdiplomasi dengan negara lain, khususnya dengan Malaysia dalam menghadapi sengketa Ambalat, agar diplomasi dapat bergerak lebih luwes dan lebih efektif karena benar-benar mempunyai kekuatan pendukung yang mampu menggetarkan pihak lawan.

.. Menghadapi Malaysia, Indonesia tidak boleh lengah sedikitpun atau mundur selangkahpun. Bersamaan dengan itu harus pula dapat dibuktikan bahwa Blok Ambalat adalah wilayah Indonesia. Sengketa di Ambalat tidak akan terlepas dari ekses perebutan pulau Sipadan dan Ligitan. Agar tidak terulang nasib kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan dan Ligitan, maka untuk menetapkan keabsahan status kawasan Ambalat tidak diperlukan dialog basa-basi. Sehubungan dengan pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, bahwa konflik Ambalat akan diselesaikan melalui cara damai, kuncinya adalah bagaimana Indonesia berkemampuan dalam berdiplomasi. Faktor ini sangat penting manakala

Indonesia tidak ingin mengulangi pengalaman pahit atas kekalahan yang dialami dalam sengketa perebutan hak kepemilikan atas Pulau Sipadan-Ligitan. Oleh karena itu, pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan dan menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia terhadap wilayah yang menjadi kedaulatannya, serta mampu mengatasi setiap ancaman dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.